



PROGRAM PEMERINTAH

Penerima KSJPS Jogja Berkurang

JOGJA—Jumlah kelompok warga miskin Kota Jogja yang masuk dalam data penerima program Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) Kota Jogja 2019 mengalami penurunan.

Uli Febrani
uli@harianjogja.com

PERBANDINGAN JUMLAH PENERIMA DAN INDIKATOR KSJPS JOGJA

2018		2019	
Rentan miskin	: 12.456 KK.	Rentan miskin	: 12.499 KK.
Miskin	: 4.781 KK.	Miskin	: 2.783 KK.
Fakir miskin	: 16 KK.		
Total penerima	: 17.253 KK.	Total	: 15.282 KK.

Sumber: wawancara (Juli)

► Pencoretan kelompok fakir miskin karena sudah tak ditemukan lagi di lapangan.

► Warga yang tak puas dengan hasil pendataan, dipersilakan mengadu ke Dinsos Jogja.

Kepala Seksi Data dan Informasi Dinas Sosial (Dinsos) Kota Jogja, Supriyanto mengatakan data penerima KSJPS 2019 adalah 15.282 kepala keluarga (KK) yang terbagi dalam dua kategori, yakni rentan miskin sebanyak 12.499 KK dan kategori miskin sebanyak 2.783 KK.

Jika dibandingkan dengan data tahun lalu, jumlah penerimanya memang mengalami penurunan. Tahun lalu penerima KSJPS mencapai 4.781 KK yang terbagi atas 12.456 KK rentan miskin dan fakir miskin 16 KK.

"Dalam KSJPS 2019, kelompok fakir miskin dicoret. Karena berdasarkan penilaian dan verifikasi di lapangan, sudah tidak lagi ditemukan warga yang masuk dalam kategori fakir," ujarnya, Selasa (12/2).

Kepala Dinsos Kota Jogja, Bedjo Suwarno mengatakan jika ada warga yang tidak puas dengan hasil verifikasi dan penilaian yang dilakukan sehingga mereka tidak masuk dalam kategori penerima, dapat menyampaikan keluhan ke Dinsos. "Namun Dinsos tidak bisa begitu saja memasukkan nama mereka sebagai penerima KSJPS. Dari awal sudah ada prosedur penilaian," kata dia.

Data Riil

Lurah Tahunan, Kecamatan Umbulharjo, Sugiharti mengakui penyusunan data warga miskin di wilayahnya dilakukan secara lebih riil. Untuk itu pihaknya akan menggandeng tim profesional bersama Pekerja Sosial Masyarakat sebagai pendata riil.

"Mereka akan difasilitasi dengan alat perekam foto dan video, untuk kelengkapan dokumentasi lapangan. Dari sana, dapat diketahui aset yang dipunya tiap warga, terutama warga yang selama ini tercatat sebagai warga miskin Tahunan," ucap dia.

Hal itu ia lakukan lantaran selama ini, sepengetahuan pemerintah, masih ada sejumlah warga yang berbohong dalam pendataan kemiskinan versi Pemerintah Pusat maupun Pemkot. Mereka mengaku miskin, walaupun memiliki sejumlah aset bernilai tinggi.

Sementara Lurah Pakualaman, Agus Joko Mulyono mengatakan pendekatan yang dilakukan di tingkat kelurahan dalam pemberdayaan ekonomi salah satunya adalah mengajak warga dari level ekonomi menengah ke bawah untuk mengikuti serangkaian pelatihan pengelolaan ekonomi keluarga.

"Dengan begitu kualitas sumber daya manusia bisa ditingkatkan, sehingga diharapkan program pemberdayaan pun bisa berjalan lebih optimal."

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005